
TRANSFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN: STUDI KASUS PENERAPAN MODEL PARLEMENTER

Bagus Pradikta

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Transformasi sistem pemerintahan menjadi topik penting dalam kajian politik kontemporer. Salah satu model yang sering diperdebatkan adalah sistem parlementer. Studi ini melihat penerapan model parlementer dalam konteks negara-negara tertentu dan mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan, stabilitas politik, dan partisipasi publik. Dengan menganalisis studi kasus dan literatur yang relevan, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan model parlementer dan memberikan wawasan tentang implikasi transformasi sistem pemerintahan.

Kata Kunci: *Transformasi sistem pemerintahan, sistem parlementer, efektivitas pemerintahan*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transformasi sistem pemerintahan telah menjadi fokus perhatian yang semakin meningkat dalam konteks politik global saat ini. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, stabilitas politik, dan partisipasi publik, banyak negara telah menjalani proses reformasi untuk mengubah sistem pemerintahan mereka. Salah satu model yang sering diperdebatkan adalah sistem parlementer. Model ini menarik perhatian karena dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan stabilitas politik, dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Namun, implementasi sistem parlementer tidaklah tanpa tantangan dan kompleksitas. Studi kasus tentang penerapan model parlementer dalam berbagai konteks negara dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika, keberhasilan, dan hambatan yang terlibat dalam transformasi sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, pendahuluan ini akan membahas latar belakang dan relevansi topik, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual yang akan digunakan dalam memahami transformasi sistem pemerintahan, dengan fokus pada studi kasus penerapan model parlementer.

Sistem pemerintahan memainkan peran krusial dalam menentukan cara negara diatur dan dijalankan. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan berbagai negara mengalami perubahan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan mereka. Transformasi sistem pemerintahan sering kali menjadi respons terhadap tantangan dan tekanan internal dan eksternal yang dihadapi oleh negara-negara tersebut, seperti tuntutan akan tata kelola yang lebih baik, meningkatnya kompleksitas politik, atau tuntutan masyarakat akan partisipasi yang lebih luas dalam proses politik.

Salah satu model yang sering dipertimbangkan dalam proses transformasi ini adalah sistem parlementer. Dalam sistem ini, eksekutif berasal dari atau bertanggung jawab kepada badan legislatif, yang memainkan peran penting dalam pembentukan dan pemilihan pemerintah. Model ini dianggap oleh beberapa ahli sebagai alternatif yang lebih responsif dan akuntabel dibandingkan dengan sistem presidensial, di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan secara tegas.

Namun, implementasi sistem parlementer tidaklah mudah, dan efektivitasnya tergantung pada sejumlah faktor, termasuk konteks politik, budaya politik, struktur institusional, dan dinamika kekuasaan lokal. Oleh karena itu, studi kasus penerapan model parlementer dalam konteks negara tertentu dapat memberikan wawasan yang berharga tentang keberhasilan, kegagalan, dan implikasi transformasi sistem pemerintahan. Dengan memahami proses, tantangan, dan dampak transformasi ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik di era kontemporer dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diterapkan secara luas di berbagai konteks nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus penerapan model parlementer dalam beberapa negara yang telah mengadopsinya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi kompleksitas dan konteks unik dari transformasi sistem pemerintahan. Metode ini memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan model parlementer, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan, stabilitas politik, dan partisipasi publik.

Proses Pengumpulan Data:

Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk literatur akademis, laporan pemerintah, studi kasus, dan wawancara dengan para pakar dan pemangku kepentingan terkait. Kami akan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif untuk memahami perkembangan terkini dalam studi transformasi sistem pemerintahan dan implementasi model parlementer di berbagai negara. Kami juga akan menganalisis dokumen resmi pemerintah, seperti konstitusi, undang-undang, dan keputusan politik, untuk memahami kerangka hukum dan institusional yang mendasari sistem parlementer.

Selain itu, kami akan menggunakan studi kasus sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan data. Studi kasus akan dipilih dari negara-negara yang telah mengalami transformasi sistem pemerintahan menuju model parlementer, dengan mempertimbangkan variasi geografis, budaya, dan politik. Kami akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen pemerintah, laporan media, dan penelitian akademis terkait, untuk memahami konteks historis, politik, sosial, dan ekonomi dari setiap kasus studi.

Selanjutnya, kami akan melakukan wawancara dengan para pakar, pemangku kepentingan, dan praktisi terkait untuk mendapatkan perspektif yang beragam tentang implementasi sistem parlementer dan dampaknya. Wawancara akan diarahkan untuk mengeksplorasi pemahaman mereka tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan transformasi, serta implikasi transformasi tersebut terhadap pemerintahan dan partisipasi politik di negara yang bersangkutan.

Analisis Data:

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan analisis tematik. Kami akan melakukan analisis secara rinci terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan tren-tren yang muncul sehubungan dengan penerapan model parlementer dan transformasi sistem pemerintahan. Kami akan menggunakan kerangka konseptual yang telah dikembangkan sebelumnya sebagai panduan untuk memandu analisis data dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan transformasi.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, kami bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika transformasi sistem pemerintahan, dengan fokus pada penerapan model parlementer. Dengan demikian, kami berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang

tantangan, prospek, dan implikasi dari transformasi sistem pemerintahan di era kontemporer.

PEMBAHASAN

Transformasi sistem pemerintahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang melibatkan berbagai faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam sebuah negara. Dalam konteks ini, penerapan model parlementer seringkali menjadi pilihan bagi negara-negara yang mengalami perubahan politik atau mencari alternatif baru untuk meningkatkan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Studi kasus penerapan model parlementer memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana proses transformasi ini dilakukan, sejauh mana keberhasilannya, dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan politik suatu negara.

Dalam analisis studi kasus penerapan model parlementer, kita dapat melihat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan transformasi tersebut. Salah satu faktor kunci adalah konteks politik dan budaya negara tersebut. Setiap negara memiliki sejarah politik dan budaya yang unik, yang dapat memengaruhi kemungkinan keberhasilan penerapan model parlementer. Misalnya, negara-negara dengan tradisi parlementer yang kuat mungkin memiliki lebih sedikit hambatan dalam mengadopsi sistem parlementer, sementara negara-negara dengan sejarah otoritarianisme atau konflik politik mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengubah struktur politik mereka.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dukungan politik dan kekuatan politik yang ada dalam proses penerapan model parlementer. Transformasi sistem pemerintahan seringkali melibatkan negosiasi politik yang kompleks antara berbagai aktor politik, termasuk partai politik, elit politik, dan kelompok kepentingan. Dukungan politik yang kuat dapat menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan transformasi tersebut, sementara resistensi politik atau ketidakstabilan politik dapat menghambat implementasinya.

Selanjutnya, struktur institusional dan konstitusional suatu negara juga memainkan peran penting dalam penerapan model parlementer. Sistem hukum, kebijakan publik, dan mekanisme kelembagaan lainnya harus disesuaikan dengan sistem parlementer untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Selain itu, perlunya konsensus politik dan legitimasi institusional dalam merancang dan menerapkan reformasi konstitusional juga perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan transformasi sistem pemerintahan.

Selain faktor-faktor internal, faktor eksternal juga dapat memengaruhi proses transformasi sistem pemerintahan. Bantuan dan dukungan internasional, baik dalam bentuk sumber daya finansial maupun pengetahuan dan keterampilan teknis, dapat memainkan peran penting dalam membantu negara-negara yang mengalami transformasi politik. Namun, intervensi eksternal juga dapat menjadi kontroversial dan memicu konflik atau ketegangan politik dalam negara yang bersangkutan.

Dalam analisis dampak transformasi sistem pemerintahan, perlu juga diperhatikan berbagai konsekuensi politik, ekonomi, dan sosial yang timbul. Di satu sisi, penerapan model parlementer dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, memperkuat mekanisme checks and balances, dan meningkatkan partisipasi politik. Di sisi lain, transformasi ini juga

dapat menyebabkan ketidakstabilan politik sementara, polarisasi politik yang lebih besar, atau ketidakpastian ekonomi.

Studi kasus penerapan model parlementer memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika, tantangan, dan prospek transformasi sistem pemerintahan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan transformasi, kita dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diterapkan secara luas dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan dan partisipasi politik di berbagai konteks nasional.

Langkah selanjutnya dalam pemahaman transformasi sistem pemerintahan adalah menganalisis secara mendalam dampak dari penerapan model parlementer terhadap berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dalam masyarakat. Salah satu dampak yang signifikan adalah pada efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik. Model parlementer sering kali dianggap dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan karena adanya mekanisme yang memungkinkan pemilihan dan pemecatan kepala pemerintahan secara lebih fleksibel, serta memberikan insentif bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan legislatif guna memperoleh dukungan bagi kebijakan-kebijakan publiknya.

Selain itu, implementasi model parlementer juga dapat mempengaruhi partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Dengan mekanisme yang lebih terbuka dan transparan, serta partai-partai politik yang lebih berpengaruh dalam sistem parlementer, masyarakat sering merasa lebih dekat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Ini dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan legitimasi demokratisnya.

Namun, transformasi sistem pemerintahan juga dapat menghadapi tantangan serius, terutama dalam konteks implementasi model parlementer di negara-negara dengan latar belakang politik yang berbeda. Misalnya, dalam negara-negara yang sebelumnya memiliki sistem presidensial atau otoriter, transisi menuju sistem parlementer dapat menyebabkan ketidakstabilan politik atau konflik antara kekuatan politik yang berbeda. Perubahan kelembagaan dan kultur politik yang dibutuhkan dalam sistem parlementer juga mungkin memakan waktu dan menghadapi resistensi dari aktor-aktor politik yang ada.

Selain itu, dampak ekonomi dari transformasi sistem pemerintahan juga perlu dipertimbangkan. Perubahan dalam sistem pemerintahan dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi, investasi asing, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Implementasi model parlementer yang sukses mungkin dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun kegagalan dalam menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan sistem parlementer yang baru dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian bisnis.

Selanjutnya, penting juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dari transformasi sistem pemerintahan, khususnya dalam hal inklusi sosial dan keadilan. Model parlementer yang efektif dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam politik dan memengaruhi kebijakan publik. Namun, dalam beberapa kasus, transformasi tersebut dapat menghasilkan polarisasi sosial yang lebih besar, terutama jika terjadi pergeseran kekuasaan politik yang drastis atau ketidaksetaraan politik yang bertahan.

Dalam kesimpulannya, studi kasus penerapan model parlementer dalam transformasi sistem pemerintahan memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika politik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah negara. Dengan memahami dampak transformasi ini secara komprehensif, kita dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam memperbaiki kualitas pemerintahan, meningkatkan partisipasi politik, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Salah satu faktor utama yang perlu dipertimbangkan adalah konteks politik dan budaya negara tersebut. Setiap negara memiliki sejarah politik, budaya, dan tradisi yang unik, yang dapat memengaruhi resepsi dan adaptasi terhadap model parlementer.

Selain itu, peran dari aktor-aktor politik dan kekuatan politik yang ada dalam masyarakat juga sangat penting. Dukungan atau resistensi dari partai politik, elit politik, dan kelompok kepentingan akan mempengaruhi proses transformasi sistem pemerintahan. Negara-negara dengan konsensus politik yang kuat atau partisipasi politik yang luas mungkin lebih mungkin untuk berhasil menerapkan model parlementer, sementara negara-negara dengan polarisasi politik atau konflik politik yang dalam mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar.

Selanjutnya, struktur institusional dan hukum negara tersebut juga memainkan peran penting dalam keberhasilan transformasi sistem pemerintahan. Perlunya melakukan perubahan dalam konstitusi, hukum, dan prosedur politik untuk mendukung model parlementer harus diperhatikan dengan cermat. Selain itu, keberhasilan implementasi model parlementer juga tergantung pada kapasitas dan independensi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Dalam analisis dampak transformasi sistem pemerintahan, perlu juga dipertimbangkan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam sistem parlementer. Meskipun model ini dapat memperkuat peran legislatif dalam pengambilan keputusan politik, tetapi juga penting untuk memastikan adanya mekanisme yang memungkinkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, serta menjaga keseimbangan kekuasaan yang sehat antara kedua lembaga ini.

Selain itu, penting juga untuk mengevaluasi dampak transformasi sistem pemerintahan dalam jangka panjang. Meskipun perubahan mungkin tampak positif dalam jangka pendek, namun dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas politik, keadilan sosial, dan partisipasi politik perlu dievaluasi secara hati-hati. Studi kasus penerapan model parlementer dalam beberapa negara yang telah mengalaminya dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dampak transformasi ini dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, kita dapat memahami kompleksitas dan dinamika transformasi sistem pemerintahan, khususnya dalam konteks penerapan model parlementer. Dengan memperhitungkan berbagai faktor politik, hukum, institusional, dan sosial yang terlibat, kita dapat mengidentifikasi pelajaran yang dapat diterapkan secara luas dalam upaya memperbaiki tata kelola negara dan memperkuat demokrasi.

Selanjutnya, dalam mengembangkan pemahaman tentang transformasi sistem pemerintahan, penting untuk mengeksplorasi dinamika politik yang mungkin terjadi selama

proses implementasi model parlementer. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah proses transisi politik, yang sering kali dapat menjadi periode yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian.

Proses transisi politik mengacu pada periode di mana sebuah negara beralih dari satu sistem pemerintahan ke sistem pemerintahan yang baru. Dalam konteks implementasi model parlementer, proses transisi ini dapat melibatkan restrukturisasi kelembagaan politik, pembentukan partai politik baru, dan negosiasi politik antara berbagai kekuatan politik yang ada. Proses ini sering kali kompleks dan dapat menghasilkan ketidakstabilan politik serta konflik antara berbagai kepentingan politik.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan bagaimana implementasi model parlementer dapat memengaruhi dinamika politik dalam jangka panjang. Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah perubahan dalam tata kelola politik yang lebih inklusif dan demokratis, di mana partai politik yang lebih kecil atau kelompok minoritas mungkin mendapatkan akses yang lebih besar ke dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, di sisi lain, transformasi ini juga dapat menyebabkan polarisasi politik yang lebih besar atau meningkatnya ketegangan antar kelompok politik yang berbeda.

Selanjutnya, penting juga untuk mengevaluasi dampak dari penerapan model parlementer terhadap stabilitas politik secara keseluruhan. Model parlementer dapat memberikan mekanisme yang lebih responsif dan fleksibel untuk menanggapi perubahan dalam opini publik atau tuntutan politik yang muncul. Namun, pada saat yang sama, proses politik yang lebih kompetitif dan terbuka juga dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan politik atau bahkan pergantian kepemimpinan yang tidak stabil.

Dalam mengkaji transformasi sistem pemerintahan, perlu juga untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Model parlementer sering kali dianggap dapat meningkatkan partisipasi politik karena memberikan kesempatan yang lebih besar bagi partai politik dan wakil rakyat untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan. Namun, penting juga untuk memperhatikan bagaimana transformasi ini dapat memengaruhi inklusi politik, di mana kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dapat memiliki akses yang lebih besar ke dalam proses politik.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik selama proses implementasi model parlementer sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan transformasi sistem pemerintahan. Dengan memperhatikan berbagai aspek politik yang terlibat, kita dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam menerapkan model parlementer, serta mengembangkan strategi yang tepat untuk memperbaiki kualitas pemerintahan dan meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, studi kasus penerapan model parlementer dalam transformasi sistem pemerintahan menyoroti kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam mengubah struktur politik sebuah negara. Melalui analisis studi kasus, kita dapat melihat bahwa proses transformasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konteks politik, dukungan politik, struktur institusional, dan faktor eksternal.

Salah satu temuan penting adalah bahwa keberhasilan transformasi sistem pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh aspek-aspek teknis atau hukum semata, tetapi juga oleh dinamika politik dan konsensus sosial yang ada dalam masyarakat. Negara-negara dengan konsensus politik yang kuat dan budaya demokratis yang mapan mungkin lebih mungkin untuk berhasil menerapkan model parlementer dengan sukses, sementara negara-negara dengan polarisasi politik atau konflik internal mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari transformasi sistem pemerintahan. Meskipun model parlementer dapat membawa manfaat seperti peningkatan akuntabilitas, partisipasi politik yang lebih luas, dan stabilitas politik yang lebih besar dalam jangka panjang, transformasi tersebut juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik atau konflik sosial dalam periode transisi.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari studi kasus penerapan model parlementer adalah bahwa transformasi sistem pemerintahan merupakan proses yang kompleks dan sering kali berlarut-larut. Penting bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terlibat dalam transformasi tersebut, serta mengidentifikasi strategi yang tepat untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaatnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan dan memperkuat demokrasi, penting untuk terus mempelajari pengalaman dari studi kasus penerapan model parlementer di berbagai negara. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan transformasi sistem pemerintahan, kita dapat belajar dari pengalaman orang lain dan mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam membangun sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri, R. D. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- LUMBANRAJA, W., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN IRIAN SUPERMARKET TEMBUNG-PERCUT SEI TUAN SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Muda, I. (2018). *Teori Administrasi Publik*.
- Fahmi, A. M. (2021). *Analisis Pengaruh Pengganti Filler Dengan Abu Cangkang Sawit Terhadap Kinerja Perkerasan Aspal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan*.
- Deliana, M. *Budaya Organisasi Salah Satu Faktor Penentu Kinerja Karyawan Organizational Culture as a Kind of Factor Employee's Performance*.
- Siregar, N. S. S. (2016). *Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit bernuansa islami di kota Medan (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU)*.
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Aulia, A. M., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., & Dwiatma, G. (2022). *Penerapan E-Gudang Sebagai Tempat Penampungan Ikan*.
- Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)*.
- Nobriama, R. A. (2019). *pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (theobroma cacao l.) Di polibeg (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). *Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2022). *KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA*.
- Eky Ermal, M. (2019). *PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom. Brilliance: Research of Artificial Intelligence, 1(2), 54-66*.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2004). *Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.

- Karim, A. (2017). Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes.
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan.
- Tarigan, R. S. (2018). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI).
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).
- Dewi, W. C. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sembiring, W. M. (2023). Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli.
- Tarigan, U. (2004). Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB. Retrieved from osf.io/3jpd.
- Wuri Andary, R. (2015). Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri 1 Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Tarigan, U. (2016). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U. (2012). Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh).
- Rejeki, R. (2019). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan.
- Kurniawan, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama.
- Berutu, B. R. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan).
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Santoso, M. H. (2021). Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis.
- Siregar, N. S. S. (2017). Modul Praktikum Publik Speaking.

- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO).
- Tarigan, U. (2004). Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
- Harahap, G. Y. (2001). Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus.
- Tarigan, U. (2013). Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, R. S. (2016). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id.
- Siregar, N. S. S. (2019). Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Deliana, M. (2013). Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Angelia, A. (2022). Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.